

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Program reformasi infrastruktur yang dilakukan pemerintah dengan menyepakati paket pinjaman ADB sebesar US \$ 428 juta pada tahun 2006 merupakan salah satu program yang bertujuan memajukan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Program ini dilakukan salah satunya karena adanya keyakinan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan sejarah perjalanan pembangunan ekonomi di Indonesia, infrastruktur ditempatkan sebagai *sector vital* dalam proses mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai proses itu dibutuhkan kerja keras agar pembangunan infrastruktur selalu meningkat tiap tahunnya.

Pada banyak Negara berkembang, investasi pada prasarana infrastruktur menjadi suatu pilihan yang disukai dan mempunyai porsi yang sangat besar dari total pengeluaran pemerintah. Ini menunjukkan besarnya peran pemerintah dalam pengadaan prasarana infrastruktur seperti pada sektor kesehatan dan pendidikan yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung berupa peningkatan kapasitas produktif dari sumber daya manusianya.

Dampak dari kekurangan infrastruktur dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Untuk itulah pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya di bidang kesehatan seperti

tertuang dalam UUD'45 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Bukan hanya dibidang kesehatan saja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, tetapi peran serta di bidang pendidikan juga sangat mempengaruhi, hal ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah seperti yang tertuang dalam UUD '45 pasal 28 C ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya dapat terealisasi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara. Karena selama ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya terpusat pada perbaikan dan pengalokasian dana APBD untuk infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, dan lain-lain. Akan tetapi, masih kurang perhatiannya pada masalah infrastruktur untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi jalan hidup bangsa dari masing-masing Negara. Pemerintah dapat jatuh atau kuat berdiri tergantung dari rendah atau tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi negaranya (Todaro, 2006: 163).

Berikut laju pertumbuhan ekonomi yang diproksi dari PDRB di Provinsi Sumatera Utara:

**Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b>	<b>Persentase</b>
2000	69.154.112.380.909	-
2001	79.331.335.138.970	14,72
2002	89.670.147.516.830	13,03
2003	103.401.370.462.659	15,31
2004	118.100.511.824.959	14,22
2005	139.618.313.637.245	18,22
2006	160.376.799.093.764	14,87
2007	181.819.737.320.359	13,37
2008	213.931.696.775.023	17,66
2009	236.353.615.827.920	10,48
2010	275.056.510.000.000	16,37
2011	314.372.440.000.000	14,29
2012	351.118.160.000.000	11,69

**Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara**

Selama tahun amatan 2000 sampai dengan 2012, besaran pertumbuhan ekonomi yang diproksi pada nilai PDRB yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara cenderung meningkat dari tahun ketahunnya. Besaran PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni 351.118,16 milyar. Sementara itu, PDRB terendah terjadi pada tahun 2000 yakni sebanyak 69.154,11 milyar. Selanjutnya, peningkatan persentase PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 18,22 persen dari tahun sebelumnya (2004) menjadi 139.618,31 milyar atau meningkat sebesar 21.517,8 milyar. Sedangkan peningkatan persentase PDRB terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 10,48 persen atau meningkat sebesar 22.421,91 milyar dari tahun sebelumnya (2008).

Meningkatnya PDRB Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya ini menunjukkan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Prov. Sumatera Utara setiap tahunnya. Ironisnya, meningkatnya pendapatan perkapita ini ternyata tidak sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan

bahwa telah terjadi kesenjangan pendapatan yang cukup jauh di masyarakat Prov. Sumatera Utara. Kesenjangan ini sebenarnya merupakan ketidakberhasilan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada.

Hal ini bisa dilihat dari perkembangan jumlah penduduk miskin di Prov. Sumatera Utara sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara**

<b>Tahun</b>	<b>Jlh (000 Jiwa)</b>	<b>Persentase</b>
2003	1889,4	15,89
2004	1800,1	14,93
2005	1840,2	14,68
2006	1979,7	15,66
2007	1768,4	13,9
2008	1613,8	12,55
2009	1499,7	11,51
2010	1490,9	11,31
2011	1407,2	11,33
2012	1421,4	10,75

**Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara**

Salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan banyaknya lapangan pekerjaan yang ada. Untuk meningkatkan PDRB ini hendaknya didukung baiknya infrastruktur pendidikan, infratraktur kesehatan dan produktifitas kerja penduduk Prov. Sumatera Utara.

Infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan jumlah penduduk dianggap memiliki peranan dalam perkembangan PDRB di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dianggap berpengaruh karena untuk mendapatkan PDRB yang berkembang dan meningkat terus menerus harus didukung dengan baiknya tingkat kualitas intelektual masyarakat yang sehat dan didukung pelayanan kesehatan

yang mudah dan memadai. Tentunya hal ini akan lebih optimal kontribusinya jika dimaksimalkan dengan kuantitas masyarakat produktif dengan jumlah yang banyak. Tentunya hal ini diharapkan akan sejalan dengan peningkatan PDRB di provinsi Sumatera Utara.

Idealnya peningkatan PDRB dan jumlah penduduk setiap tahunnya sejalan dengan perkembangan infrastruktur baik di bidang kesehatan dan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini karena untuk memajukan suatu daerah maka perlu pembangunan manusia itu sendiri melalui layanan pendidikan yang layak dan memadai serta dijalani dengan jiwa raga yang sehat pula. Hal ini diharapkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat menciptakan peningkatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan lebih produktif. Adapun perkembangan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

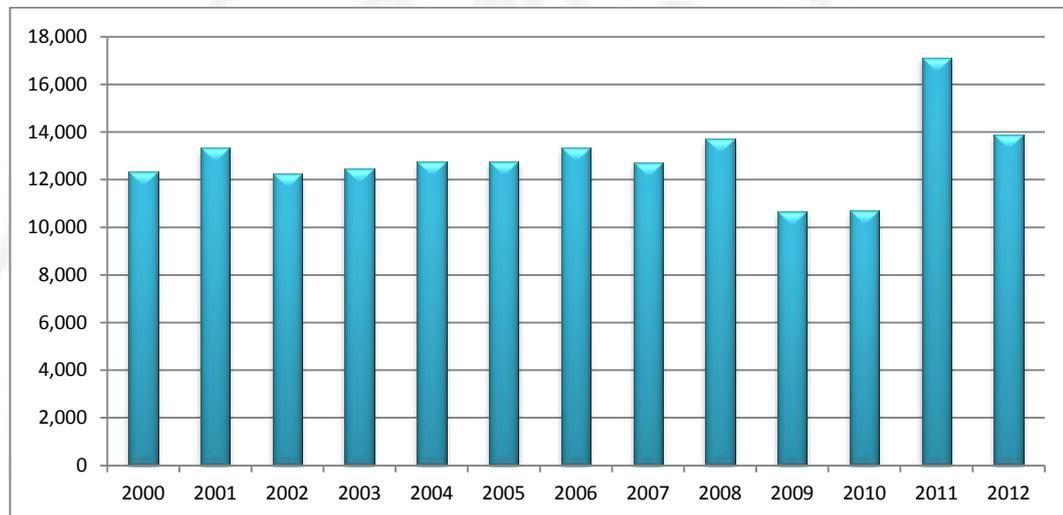
**Tabel 1.3. Perkembangan Infrastruktur Pendidikan, Infrastruktur Kesehatan dan Jumlah Penduduk Tahun 2000 sampai dengan 2012**

Tahun	Infrastruktur Pendidikan				Total	Infrastruktur Kesehatan		Total	Jumlah Penduduk
	SD	SMP	SMA	SMK		RS	Puskesmas		
2000	9.519	1.705	624	489	12.337	26	19.067	19.093	11.513.973
2001	9.714	1.836	1.309	489	13.348	30	20.039	20.069	11.722.397
2002	9.343	1.699	665	532	12.239	30	19.935	19.965	11.847.075
2003	9.309	1.775	803	564	12.451	32	19.634	19.666	11.890.399
2004	9.436	1.876	843	575	12.730	34	17.628	17.662	12.123.360
2005	9.594	1.818	784	585	12.781	29	15.742	15.771	12.326.678
2006	9.691	1.844	1.237	569	13.341	29	15.978	16.007	12.643.494
2007	9.274	1.975	857	601	12.707	57	18.003	18.060	12.834.371
2008	10.277	1.996	717	704	13.694	62	18.101	18.163	13.042.317
2009	7.446	1.562	928	704	10.640	59	18.161	18.220	13.248.386
2010	7.427	1.888	912	479	10.706	44	21.155	21.199	12.982.204
2011	11.693	3.201	1.402	834	17.130	44	20.881	20.925	13.103.596
2012	9.467	2.584	1.100	755	13.906	61	22.168	22.229	13.215.401

**Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan Tabel 1.3. di atas jumlah infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahunnya. Sedangkan untuk perkembangan jumlah penduduk cenderung stabil dan meningkat dari tahun

ketahunnya. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah infrastruktur pendidikan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari gambar berikut :



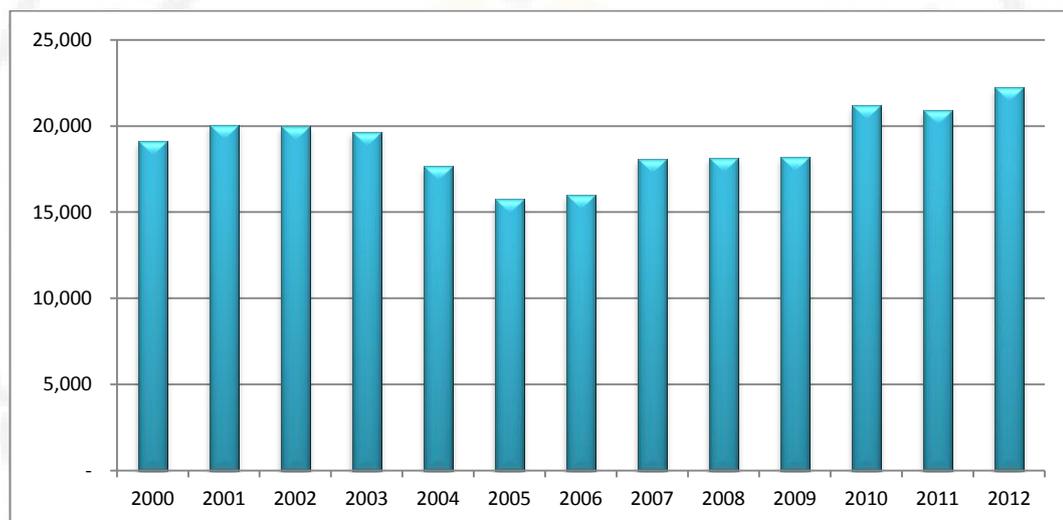
Sumber : Data diolah (BPS Provinsi Sumatera Utara)

**Gambar 1.1 Jumlah Infrastruktur Pendidikan dan Sejenisnya Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000 sampai dengan 2012**

Berdasarkan Tabel 1.1. dan Gambar 1.1. di atas dapat diketahui bahwa besaran infrastruktur pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni 17.130 sekolah. Sementara itu, infrastruktur pendidikan terendah terjadi pada tahun 2009 yakni sebanyak 10.706 sekolah. Infrastruktur di bidang pendidikan ini dilihat melalui jumlah sekolah untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan sederajat. Jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa idealnya semakin meningkat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah sejalan dengan peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah tersebut. Namun ternyata tidak semua naiknya pertumbuhan ekonomi diikuti dengan naiknya jumlah infrastruktur pendidikan. Hal ini bisa jelas diamati misalnya pada tahun 2009, naiknya PDRB pada tahun tersebut sebesar 10,48 persen menjadi ternyata berbanding terbalik

dengan menurunnya jumlah infrastruktur pendidikan sebesar 22,3 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksejajaran jumlah PDRB dengan jumlah infrastruktur pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah infrastruktur kesehatan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari gambar berikut:



Sumber : Data diolah (BPS Provinsi Sumatera Utara)

**Gambar 1.2. Jumlah Infrastruktur Kesehatan dan Sejenisnya Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000 sampai dengan 2012**

Berdasarkan Tabel 1.1. dan Gambar 1.2. di atas dapat diketahui bahwa jumlah infrastruktur kesehatan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni 22.229 unit.

Sementara itu, infrastruktur kesehatan terendah terjadi pada tahun 2005 yakni sebanyak 15.771 unit. Infrastruktur di bidang kesehatan ini dilihat melalui jumlah puskesmas dan rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi diketahui bahwa idealnya semakin meningkat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, maka sejalan dengan peningkatan infrastruktur kesehatan di daerah tersebut. Namun ternyata tidak semua naiknya pertumbuhan ekonomi diikuti dengan naiknya jumlah infrastruktur

kesehatan. Hal ini bisa jelas diamati misalnya pada tahun 2005, naiknya PDRB pada tahun tersebut sebesar 14,22 persen menjadi ternyata berbanding terbalik dengan menurunnya jumlah infrastruktur kesehatan sebesar 10,71 persen. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksejajaran jumlah PDRB dengan jumlah infrastruktur kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.

Melihat fenomena ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus dapat mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan pokok utama dalam pembangunan dan pertumbuhan masa depan ekonomi Indonesia. Bukan hanya menambah infrastruktur yang menjadi rencana yang harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga kualitas bangunan, kelayakan, perawatan dan perbaikan infrastruktur yang sudah ada untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah untuk rencana jangka pendek dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antar daerah harus menjadi prioritas jangka panjang. Tidak hanya itu, peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya sebenarnya adalah sebuah ancaman nyata jika pemerintah tidak meningkatkan jumlah infrastruktur pendidikan dan kesehatan masyarakat secara berimbang. Hal ini bisa mengakibatkan banyaknya generasi penerus bangsa yang kurang cerdas dan kurang sehat akibat mahalnya biaya kesehatan dan pendidikan di provinsi ini, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mengetahui sebesar apa pengaruh infrastruktur pendidikan, kesehatan dan jumlah penduduk dalam kaitannya dengan

pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan suatu penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Pendidikan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

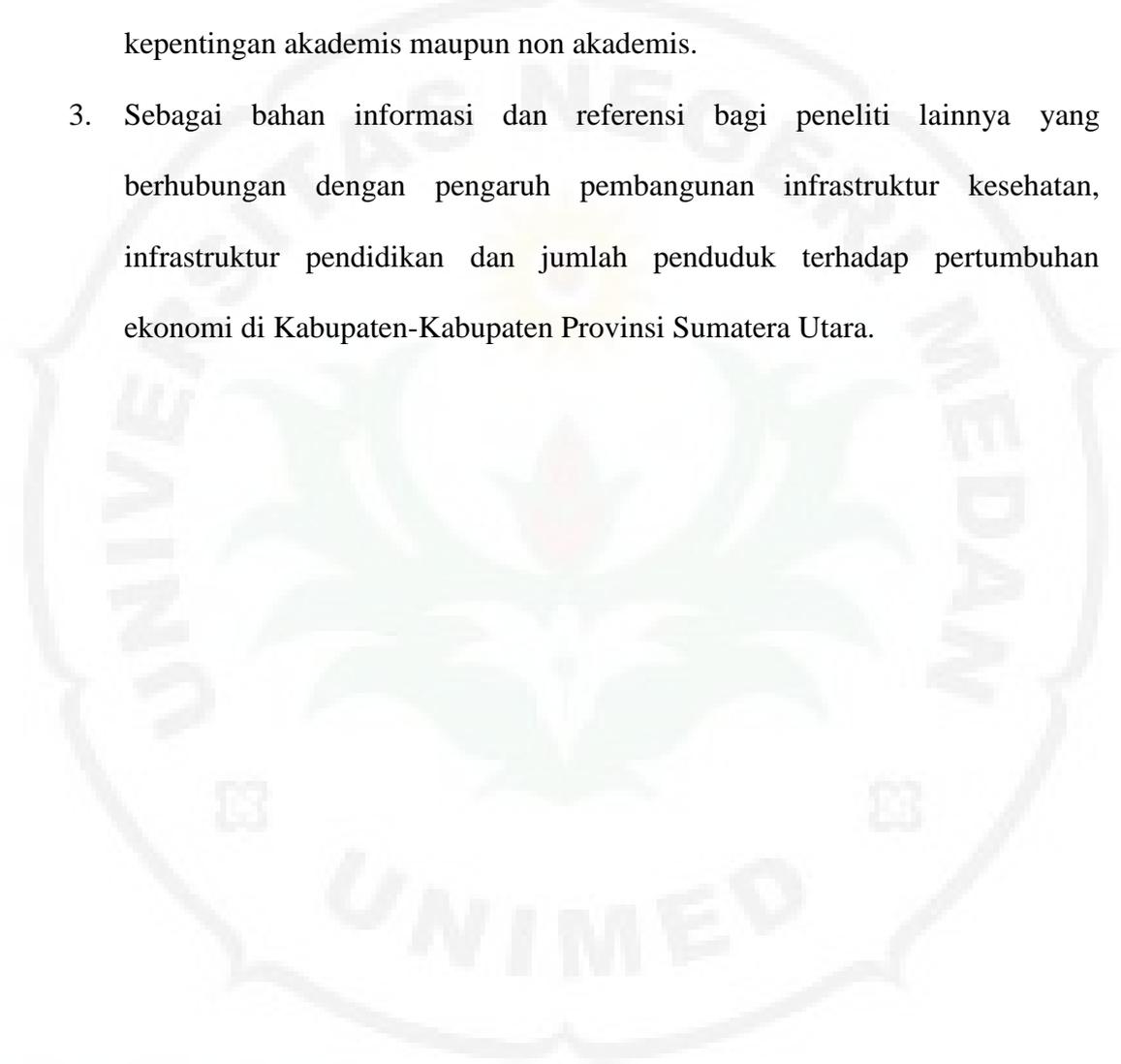
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembangunan infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar, beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tentang pengaruh pembangunan infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yaitu :

1. Memberi masukan dalam mengambil kebijakan program pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara.

2. Memberi masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk kepentingan akademis maupun non akademis.
3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan pengaruh pembangunan infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten-Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY